

PROGRAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG

Ana Puji Lestari, Mochammad Saleh Soeaidy, Abdullah Said

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: annaessya@gmail.com

Abstract: *The Innovation Program of Trash Management in Malang City.* Trash problem in Malang City caused by the more trash source that emerge in Malang City. Therefore, trash management innovation is necessary to cope with trash problem that occurs. This research use descriptive qualitative research method. This research result shows that trash management innovation of more emerge from citizen. The innovation strategy of trash management by DKP is cooperating with environmental activist to develop and invite the environmental activists to socialisation. The effectiveness of trash management policy is effective but still not optimal enough because of many factor. The impact of management there is awareness from citizen, additional income for the citizen and achieved trophy Adipura.

Keywords: *innovation, the trash management, Malang City*

Abstrak: **Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang.** Permasalahan sampah di Kota Malang disebabkan oleh semakin banyaknya sumber sampah yang bermunculan. Oleh karena itu, inovasi pengelolaan sampah diperlukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan sampah lebih banyak muncul dari kalangan masyarakat. Strategi inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan DKP dengan merangkul penggiat lingkungan yang dilakukan dengan mengembangkan dan mengajak sosialisasi penggiat lingkungan. Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sudah efektif namun belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dampak pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat mulai terbentuk, tambahan pendapatan bagi masyarakat dan diraihnya adipura kencana.

Kata kunci: *inovasi, pengelolaan sampah, Kota Malang*

Pendahuluan

Paradigma lama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) yaitu hanya sebatas kumpul, angkut dan buang yang berakhir di TPA. Cara pengelolaan sampah dengan pendekatan lama menimbulkan banyak masalah salah satunya pencemaran air. Paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah terpadu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengelolaan sampah bertumpu pada konsep 3R.

Kota Malang merupakan kawasan strategis yang didukung dengan berkembangnya industri, pusat perbelanjaan, dan kota pelajar. Perkembangan tersebut menyebabkan banyaknya investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya. Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Malang adalah semakin banyaknya sumber-sumber sampah yang bermunculan di Kota Malang, pembangunan usaha dibidang penginapan, penyedia kebutuhan pokok yang marak bermunculan. Latar belakang perubahan strategi

pengelolaan sampah di Kota Malang antara lain: ditingkat hulu, kondisi lingkungan sangat memprihatikan yaitu gunung sampah di sungai menyebabkan pendangkalan, banjir, penyakit, saluran air buntu dan sampah banyak yang tercecer dipinggir jalan mengganggu arus kendaraan. Di TPS (tempat pembuangan sementara) terjadi penumpukan sampah karena sampah banyak yang belum terangkut menyebabkan lingkungan tidak sehat, sarana prasarana mudah rusak dan sering terjadi kebakaran di TPS. Permasalahan di TPA (tempat pembuangan akhir) yaitu sampah dibuang begitu saja di TPA dengan sistem *open dumping* yaitu cara pembuangan sampah yang sederhana, yaitu sampah dihamparkan disuatu lokasi dan dibiarkan begitu saja, setelah lokasi penuh dengan sampah maka ditinggalkan. Teknik *open dumping* menyebabkan umur TPA pendek, sering terjadi kebakaran dan menimbulkan masalah pencemaran air. (Hasil wawancara prariset dengan DE (L, 41 tahun) Pelaksana Teknis TPA pada tanggal 12 Oktober 2013 jam 10.00 WIB). Inovasi pengelolaan sampah diperlukan untuk mengatasi

permasalahan sampah yang terjadi di Kota Malang, adanya inovasi dalam pengelolaan sampah adalah suatu keharusan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik berdampak pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Langkah-langkah untuk menumbuhkembangkan inovasi membutuhkan suatu sistem yang disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Dan Nomor 36 Tahun 2012. SIDa membantu daerah dalam menghasilkan dan mengembangkan produk unggulannya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mengatur dan mengarahkan untuk terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis serta mendorong terciptanya teknologi baru yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi proses.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah dan sejenis rumah tangga terdiri dari: pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Kebijakan pengelolaan sampah mengacu, mempertimbangkan dan mensinkronisasikan dengan kebijakan pengelolaan sampah provinsi dan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Mengingat permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap kota, dampak yang ditimbulkan sangat besar pada kelestarian lingkungan. Penjelasan tentang masalah pengelolaan sampah yang saling berkaitan antara judul maka, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang, bagaimanakah tingkat keberhasilan dan dampak program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang, dan Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan bentuk dan pelaksanaan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan dan dampak, dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang. Manfaat penelitian sebagai bahan masukan dan pertim-

bulan bagi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah kota.

Tinjauan Pustaka

1. Inovasi

Rogers (dikutip dari Suwarno, 2007, h.3) menjelaskan inovasi adalah “sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya”. Menurut Mckeown (dikutip dari Ancok, 2012, h.34-35) bahwa “inovasi adalah suatu bentuk perubahan dari suatu hal, baik yang bersifat inkremental (sedikit demi sedikit), maupun perubahan yang radikal”. Penerapan inovasi dalam kehidupan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari segi sosial dan ekonomi. Muluk (2008, h.47) membagi inovasi menjadi 3 level, yaitu inovasi inkremental, radikal dan transformatif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi secara terarah dan berkesinambungan.

2. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UU 32/2004 Pasal 14 ayat (1), membagi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi 16 urusan.

3. Kebijakan Publik

Parker (dikutip dari Abdul Wahab, 2008:51) kebijakan publik sebagai “suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis”. Inti dari kebijakan publik adalah perumusan kebijakan, karena didalamnya terdapat batasan-batasan kebijakan itu. Perumusan kebijakan menggunakan model kebijakan, model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks, model merupakan pengganti kenyataan. Model inkrementalisme (*policy* sebagai kelanjutan masa lalu), inti dari model ini menekankan bahwa pembuat kebijakan tidak melakukan peninjauan secara teratur dari seluruh kebijakan yang telah dibuatnya, tidak mau melakukan identifikasi tujuan-tujuan sosial, meneliti untung rugi dari alternatif-alternatif *policy* yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, mengklasifikasi

preferensi bagi setiap alternatif dalam hubungannya dengan perhitungan untung dan rugi, dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan.

4. Efektivitas

Subagyo mengatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan, (Budiani, 2007, h.52). Dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Tolak ukur efektivitas adalah elemen yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian pada efektivitas, semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Budiani, (2007, h.53) mengatakan terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program
- b. Sosialisasi program
- c. Tujuan program
- d. Pemantauan

5. Sampah dan Pengelolaannya

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. (Damanhuri & Tri, 2011, h.6-8) mengatakan aspek-aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah antara lain:

- a. Peraturan atau hukum dan kebijakan publik
- b. Kelembagaan dan organisasi
- c. Teknik operasional
- d. Finansial dan ekonomi
- e. Sosial
- f. Lingkungan hidup

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang, meliputi: (a) strategi inovasi dan bentuk inovasi (b) regulasi pengelolaan sampah (c) efektivitas kebijakan inovasi (2) keberhasilan dan dampak program inovasi pengelolaan sampah terhadap masyarakat Kota Malang, meliputi: (a) keberhasilan inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang (b) dampak inovasi pengelolaan sampah terhadap masyarakat Kota Malang secara sosial, ekonomi dan lingkungan, dan (3) faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program inovasi pengelolaan sampah di Kota

Malang. Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, masyarakat penggiat lingkungan dan Bank Sampah Kota Malang (BSM).

Jenis dan sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Hubberman (1992, h:16-17) yang membagi analisis data kualitatif menjadi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

1. Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang

a. Strategi dan Bentuk Inovasi

Strategi inovasi dilakukan oleh DKP dengan merangkul penggiat lingkungan dengan cara mengembangkan inovasi dan mengajak sosialisasi penggiat lingkungan. Bentuk inovasi yang berasal dari DKP adalah pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar. Inovasi yang berasal dari masyarakat adalah budidaya cacing, pemanfaatan gas metan untuk listrik, BSM (Bank Sampah Malang), pembuatan kompos, pembudidayaan markisa dan pembuatan etanol.

Pengelolaan sampah di Kota Malang belum dilakukan dengan kerjasama pihak swasta maupun pihak ketiga, hal ini disebabkan karena DKP masih mampu untuk mengelola sampah dan belum adanya pihak ketiga yang sesuai untuk diajak kerjasama. Tindakan DKP sangat tepat dalam memutuskan kriteria pihak ketiga, dimana kerjasama yang akan dilaksanakan nantinya membawa visi sosial dan bisnis berjalan dengan seimbang tanpa mengedepankan bisnis murni.

b. Regulasi

Kebijakan pengelolaan merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota, sehingga sosok walikota mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan kebijakan yang bersifat meneruskan bukan radikal atau revolusioner. Kota Malang dijadikan program *pilot project* oleh pemerintah pusat, namun kenyataannya Pemerintah Kota Malang sendiri belum mempunyai kebijakan penguatan SIDA yang terbukti dari belum adanya kebijakan dan dokumen pembangunan yang membahas tentang SIDA. Serta inovasi pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan belum dijadikan pro-

gram pada dokumen Renstra maupun dokumen pembangunan lainnya.

c. Efektivitas Kebijakan

1) Ketepatan Sasaran Program

Sasaran dari kebijakan inovasi pengelolaan sampah adalah mewujudkan Kota Malang sebagai kota “*zero waste*”. Sampai saat ini pencapaian sasaran sudah mencapai 50%, yang terlihat dari beberapa lokasi sudah menjalankan konsep *zero waste* dengan metode 3R.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang (DKP) dengan menerapkan strategi dari tingkat hulu hingga tingkat hilir. Sosialisasi diberikan kepada instansi kecamatan, kelurahan dan kader lingkungan yang akan menyampaikan langsung kepada masyarakat dan instansi-instansi sekolah ataupun instansi yang sejajar dengan DKP. Adanya kontak langsung dengan pelaksana program memudahkan proses tersampainya informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh DKP sudah berjalan dengan efektif, namun sosialisasi perlu ditingkatkan terutama di daerah perbatasan dan daerah yang padat penduduknya.

3) Tujuan Program

Tujuannya yaitu mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang bersih, nyaman, asri dan ijo royo-royo. Jika dilihat dari kondisi Kota Malang saat ini bersih, nyaman dan asri menjadi Kota Malang sebagai kota layak huni yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Banyaknya pendatang yang ada di Kota Malang membuktikan bahwa Malang sebagai kota layak huni yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berdatangan di Kota Malang. Misi DKP meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan, dan mengelola TPA dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Misi tersebut dijalankan melalui strategi pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga tingkat hilir. Keadaan sekarang menggambarkan adanya kesesuaian antara rencana tujuan kebijakan pengelolaan sampah dengan hasil yang diperoleh setelah menerapkan kebijakan.

4) Pemantauan

Terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh DKP sebagai organisasi penyelenggara dan penanggung jawab dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan DKP ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana program yang telah dilaksanakan. Selain pemantauan yang dilakukan oleh DKP sendiri,

pemantauan tentang kualitas lingkungan juga dilakukan oleh BLH dan inspektorat. Sinergi antara pelaku tersebut sangat efektif untuk mengetahui jalannya suatu kebijakan di Kota Malang, hal ini karena dalam proses pemantauan tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, penilaian dari instansi lain yang mampu memberikan saran dan kritik untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil pengamatan tentang efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang dilihat dari tolak ukur dapat dikatakan efektif tetapi belum optimal. Dikatakan efektif karena tujuan yang telah ditargetkan tercapai, meskipun belum tercapai secara maksimal. Sasaran pengelolaan sampai sudah pada tahap menuju *zero waste*, untuk menerapkan *zero waste* masih membutuhkan sinergi beberapa aktor. Kebijakan pengelolaan sampah juga membawa dampak yang positif bagi lingkungan dan sebagian masyarakat.

2. Keberhasilan dan Dampak Pengelolaan Sampah Di Kota Malang

a. Keberhasilan Pengelolaan Sampah di Kota Malang

1) Peraturan atau hukum dan kebijakan publik

Pengelolaan sampah di Kota Malang sudah mempunyai peraturan dan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 yang sudah berpedoman pada UU 18/2008. Selain itu, dalam mendukung sistem pengelolaan sampah pemerintah juga membuat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang berisi besaran retribusi pelayanan sampah, dan rencana induk pengelolaan sampah tahun 2007. Rencana induk pengelolaan sampah tahun 2007 diwujudkan dalam penyusunan master plan persampahan.

2) Kelembagaan dan organisasi

Pembentukan DKP sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Institusi pengelolaan sampah telah jelas struktur dan bagian-bagian yang menangani. Kejelasan struktur pengelolaan sampah di Kota Malang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menyelenggarakan pelayanan kebersihan sampah dengan institusi lain. Terbaginya struktur pengelolaan juga memudahkan pola pertanggungjawaban kepada pemimpin instansi.

3) Teknik operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah di Kota Malang terdiri dari kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Teknik operasional pengelolaan sampah di Kota Malang sudah berjalan dengan baik, dengan didukung adanya jam kerja kebersihan jalan.

4) Finansial dan ekonomi

Pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Malang berasal dari beberapa sumber baik dari APBD, APBDprov dan APBN. Di Kota Malang (APBD) sendiri sumber pendanaan pengelolaan sampah bersumber dari retribusi, PAD dan bagi hasil. Hambatan dalam pengelolaan sampah yang paling utama adalah berkaitan dengan pendanaan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sumber pendapatan daerah dan mahalnnya ongkos pengembangan teknologi informasi.

5) Sosial

DKP telah melibatkan masyarakat dalam melakukan usaha pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan membiasakan perilaku masyarakat adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, hal ini disebabkan budaya dalam masyarakat sulit untuk dirubah. Upaya yang dilakukan oleh DKP untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan maksimal. Buktinya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem pengelolaan sampah dari sumber sampah, dan masih banyak masyarakat yang acuh dengan sistem pengelolaan sampah yang ada diwilayahnya.

6) Lingkungan hidup

Pada tahap pengurangan sampah pada tahun 2013 DKP baru mampu mencapai 10% sedangkan, target provinsi sampai dengan tahun 2020 adalah 20% dan target pengurangan sampah pada tahun 2014 adalah 26%.

Berdasarkan pengamatan tentang keberhasilan program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang, masih terkendala oleh beberapa faktor yaitu terbatasnya finansial, budaya masyarakat yang masih sulit dirubah dan target pengurangan sampah yang belum tercapai.

b. Dampak Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Pada pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sudah mampu memberikan dampak, walaupun presentasinya masih kecil. Dampak pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Sosial

Dampak pengelolaan sampah yang paling nyata bahwa masyarakat sekitar TPA meminta untuk TPA tidak dipindahkan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mau menerima keberadaan TPA, setelah masyarakat sekitar TPA merasakan dampak dari adanya TPA. Dan

selama keberadaan TPA tersebut belum pernah adanya aksi protes dari warga sekitar. Adanya lomba lingkungan antar RW dapat memupuk rasa guyub rukun dan gotong royong diantara masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal diperumahan yang cenderung individualis. Dampak pengelolaan sampah yang masih tampak saat ini baru membawa perubahan yang kecil terhadap masyarakat, hal ini disebabkan pengelolaan sampah belum maksimal.

2) Ekonomi

Diraihnya penghargaan dari JPIP (Otonomi Award dari *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi*) berupa piala silver dengan kategori pemberdayaan ekonomi, membuktikan bahwa secara ekonomi terdapat peningkatan dari pengelolaan sampah di Kota Malang khususnya melalui BSM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan ekonomi hanya dirasakan bagi masyarakat yang tergabung menjadi nasabah BSM/unit dan dari golongan menengah kebawah. Perlu diingat kembali bagi sebagian orang bahwa, sampah pada saat ini masih pada tataran sebagai nilai tambahan ekonomi, bukan menjadi penopang ekonomi masyarakat.

3) Lingkungan

Penghargaan adipura kencana adalah hasil yang diperoleh Pemerintah Kota Malang (DKP) dalam pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan sampah. Kondisi lingkungan yang semakin bersih, asri, sehat dan nyaman menjadikan Kota Malang sebagai kota layak huni akibatnya orang banyak berdatangan. Sektor pendidikan dan ekonomi juga semakin meningkat. Perlu diketahui bahwa kerusakan lingkungan yang ada di Kota Malang tidak hanya disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan standar. Banyak penyebab kerusakan lingkungan, seperti semakin banyaknya polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan yang semakin bertambah dan pencemaran air serta ekosistem lingkungan yang disebabkan karena semakin bertambahnya pabrik-pabrik di Kota Malang.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

1) Edukasi pemilahan sampah dari BSM

Edukasi pemilahan sampah yang diberikan oleh BSM mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dan merawat lingkungan. Kesadaran masyarakat dalam ikut serta melakukan pengelolaan sampah merupakan suatu dukungan positif, tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisi-

sipasi dalam melakukan pengelolaan sampah, program yang dijalankan tidak akan berhasil.

2) Adanya pelatihan dan seminar

Adanya pelatihan, seminar dan lokakarya akan memberikan suatu dukungan bagi masyarakat terutama melalui kader lingkungan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan sampah yang sebaiknya dilakukan. Selain itu, dengan adanya pelatihan, seminar dan lokakarya merupakan suatu bentuk sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka, selain mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan ketrampilan.

3) Adanya dukungan, penghargaan, dan diajak sosialisasi

Adanya dukungan berupa penghargaan, piagam, diajak sosialisasi dan banyaknya tamu yang datang memberikan motivasi tersendiri bagi penggiat lingkungan, kader lingkungan dan masyarakat. Dukungan-dukungan terutama dari pemerintah kota perlu terus ditingkat karena tanpa adanya dukungan pemerintah kota, inovasi yang berasal dari masyarakat tidak dapat berjalan, dan sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah kota membutuhkan peran dari semua pihak yang ada dalam suatu wilayah tersebut.

b. Faktor Penghambat

1) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang efektif dan efisien

Terbatasnya pengetahuan warga tentang lingkungan dan bahaya apabila tidak mengelola lingkungan dengan benar masih kurang. Dan kurangnya informasi serta sosialisasi pemerintah kota yang terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bentuk inovasi pengelolaan sampah atau strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang (DKP).

2) Terbatasnya anggaran

Terbatasnya anggaran pemerintah kota selama ini masih menjadi kendali utama dalam melaksanakan apapun kebijakannya, dana yang digunakan untuk investasi pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang sangat besar. Anggaran dari APBD kota tidak mampu untuk memenu-

hi kebutuhan dana yang diperlukan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dana Pemerintah Daerah Kota Malang dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun dengan pihak ketiga.

3) Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh DKP saat ini sudah memadai, namun kenyataannya sarana dan prasarana itu tidak dapat ditambah jumlahnya. Selain itu, sarana dan prasarana yang disediakan DKP seperti gerobak sampah, tempat sampah dan truk belum adanya pemisahan. Sedangkan untuk menunjang pengelolaan sampah yang terpadu diperlukan sarana dan prasarana pendukung, agar program dapat berjalan dengan lancar.

4) Terbatasnya ketrampilan dan kemampuan dalam menangkap peluang

Inovasi pengelolaan sampah untuk bisa menjadi satu terapan membutuhkan riset, waktu dan dana yang cukup banyak. Inovasi yang baik adalah inovasi yang belum banyak dilakukan oleh banyak orang, sehingga akan menimbulkan manfaat dan menarik banyak orang. Keterbatasan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan oleh aparatur birokrasi dalam menangkap peluang membuat inovasi yang dilakukan tidak bisa menjawab peluang dan tantangan dari lingkungan masyarakat, sehingga inovasi cenderung sia-sia. Selain itu, masih terbatasnya kemampuan mengorganisir sumber daya yang dimiliki birokrasi sehingga tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang tersedia.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang lebih banyak muncul dari kalangan masyarakat/penggiat lingkungan. Program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan saat ini belum masuk menjadi program pengelolaan sampah, terutama dalam renstra DKP dan dokumen pembangunan lainnya. Kebijakan pengelolaan sampah yang telah diatur sudah efektif, namun dalam pelaksanaannya belum optimal.

Daftar Pustaka

- Ancok, Djamaludin. (2012) **Psikologi Kepemimpinan & Inovasi**. Jakarta, Erlangga.
- Budiani, Ni Wayan. (2007) Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. [Internet], 2 (1). Available from: <<http://www.pdfio.com/k-1921809.html>> [Accessed: 10 Oktober 2013].
- Damanhuri, Enri dan Tri Padi. (2011) **Buku Ajar Teknologi Pengolahan Sampah**. Bandung, ITB Press

- Miles, Matthew B. dan Michael Huberman. (1992) **Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru**. Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Muluk, Khairul. (2008) **Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah**. Malang, Bayumedia.
- Suwarno, Yogi. (2008) **Inovasi Sektor Publik**. Jakarta, STIA- LAN Press.
- Undang-undang No.18 Tahun 2008 **Tentang Pengelolaan Sampah**. Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah** (c.3) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.